



Sidak Jalan Lingkar Pasar Semarapura

Komisi II Minta Sampel Aspal "Coldmix"

untuk Diuji

Semarapura (Bali Post) -

Komisi II DPRD Klungkung yang membidangi pembangunan, Kamis (8/6) kemarin melakukan sidak proyek jalan lingkar Pasar Semarapura. Anggota Komisi II ini mengaku curiga terkait kualitas pengaspalan menggunakan aspal *coldmix*. Untuk itu, Komisi II pun meminta sampel aspal *coldmix* itu untuk diuji kualitasnya.

Ketua Komisi II Komang Suantara menyampaikan

pihaknya sepakat untuk meminta kepada pihak pemborong menyiapkan sampel aspal *coldmix* yang digunakan pada proyek di Pasar Semarapura. "Kami melihat ada yang aneh. Di kota kebanyakan menggunakan aspal *hotmix*. Kenapa jalan pasar kok pakai *coldmix*?" tanya Suantara.

Ia pun mengaku sudah melayangkan surat kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perindag agar dalam waktu dua hingga

tiga hari sudah menyiapkan sampel. "Kami juga sudah minta dokumen proyek, tapi pihak dinas beralasan tidak bisa karena dokumen itu sifatnya rahasia. Saya tanya yang mana rahasia, dinas tidak menjawabnya," ungkap Suantara. Berangkat dari hal itu, Suantara mengaku makin kuat keinginan Komisi II untuk mengawasi proyek bernilai Rp 1,1 miliar tersebut.

Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan Wayan Ardiasa

mengatakan pihak pemborong sudah siap dengan sampel aspal *coldmix*. "Dari pelaksana sudah siap dengan sampelnya. Kata Dewan sampel itu akan diuji di luar daerah," terang Ardiasa. Soal dokumen proyek, Ardiasa menjelaskan secara mekanisme, Dewan mesti bersurat kepada Bupati. "Kalau Bupati sudah mengizinkan, kami pasti akan menunjukkan dokumen itu. Sebab ada dokumen yang bisa dibuka untuk umum, ada

yang sifatnya rahasia," kata Ardiasa.

Ia menambahkan sejak awal proyek jalan lingkar sudah dirancang menggunakan aspal *coldmix*. Tapi Ardiasa tidak menjelaskan alasan kenapa proyek itu menggunakan aspal *coldmix*. "Kami tidak punya orang teknis. Saya sendiri orang sarjana ekonomi. Dari penjelasan staf saya, sejak perencanaan pakai aspal *coldmix*," demikian Ardiasa. (dwa)

Edisi : Jumat, 9 Juni 2017

Hal : 10



Anggaran Mentok

Bawaslu Bali Ancam Rekomendasikan Penundaan Pilgub

Denpasar (Bali Post) -

Bawaslu Bali mengancam akan mengeluarkan rekomendasi penundaan Pilgub 2018. Hal tersebut dilakukan bila Bawaslu Bali tetap mentok tidak mendapatkan kepastian anggaran sesuai usulan awal Rp 68 miliar. Rekomendasi yang sama juga akan dikeluarkan untuk penundaan Pilkada Gianyar, mengingat anggaran untuk pilkada sama sekali belum dianggarkan di kabupaten itu.

"Itu kondisi terburuk. Bisa saja Agustus nanti kami hanya melantik Panwas Kabupaten Klungkung untuk mengawasi pemilihan bupati di sana. Sementara sisanya akan kami lantik bulan September untuk mengawasi Pileg-Pilpres 2019," ujar Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia, di Denpasar, Kamis (8/6) kemarin.

Rudia mengaku kecewa lantaran Pemprov Bali melalui Bappeda dan Litbang menghitung kebutuhan anggaran pengawasan hanya Rp 30 miliar. Sementara anggaran pengawasan yang diusulkan Rp 68 miliar setelah berkali-kali dibahas di Kesbangpol dan Linmas Bali. Itu pun sudah dipangkas dari usulan sebelumnya Rp 73 miliar. "Dari mana dapat Rp 30 miliar? Kapan dibahas, bagaimana cara menghitungnya dan dasar hukumnya apa?" kilahnya.

Walaupun anggaran belum pasti, Rudia mengaku tetap merekrut panwas kabupaten/kota lantaran sudah menjadi agenda nasional. Kalaupun nanti pilkada ditunda, panwas terpilih akan dilantik untuk mengawasi Pileg dan Pilpres 2019.

Di sisi lain, pihaknya akan mengundang Kesbangpol dan Linmas serta Bappeda dan Litbang Provinsi Bali untuk mendapatkan

penjelasan proses penganggaran pilgub. "Kami akan undang beliau-beliau untuk berkoordinasi. Paling tidak nanti kami dapat penjelasan yang akurat, sehingga tidak berburuk sangka," ungkap mantan Ketua Panwas Buleleng ini.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Bali I Putu Astawa mengatakan, anggaran untuk Bawaslu Bali memang dijatah Rp 30 miliar. Pasalnya, APBD Provinsi tengah mengalami defisit 8,33%. Hal ini terjadi, salah satunya akibat alih kewenangan SMA/SMK ke provinsi. Sementara Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat tidak mencukupi. "Kemudian pendapatan kita stagnan, terus yang kemarin kita tekor anggaran Rp 400 miliar. Kemudian Badung tidak lagi menyeter PHR (Pajak Hotel dan Restoran)," imbuhnya.

Terkait ancaman Bawaslu Bali, Astawa mengaku akan berkomunikasi kembali dengan salah satu penyelenggara pilkada itu. Utamanya agar Bawaslu mengerti keadaan ekonomi Pemprov Bali saat ini. "Kita perlu ketemu untuk dialog nanti dengan TAPD, Bawaslu, karena kemampuan kita seperti itu adanya," tandasnya. (kmb32)

Edisi : _____

Hal : _____



Bali Post



Kasus Dugaan Korupsi Pepadu

Berkas Tersangka Kembali Diteliti Jaksa

Negara (Bali Post) -

Berkas kasus dugaan tindak pidana korupsi Pengembangan Pertanian Terpadu (Pepadu) yang dilimpahkan Unit Tipikor Reskrim Polres Jembrana saat ini kembali diteliti Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana. Sebelumnya berkas ini sempat dikembalikan atau P-19 beberapa waktu lalu. Jaksa belum menyimpulkan apakah berkas itu sudah lengkap

(P-21) atau harus diperbaiki lagi.

Kasi Pidana Khusus (Pid-sus) Kejari Jembrana I Made Pasek Budiawan, Kamis (8/6) kemarin mengatakan berkas kasus tersebut baru dilimpahkan penyidik Sat Reskrim dan saat ini masih diteliti. Berkas setebal 20 cm itu masih dipelajari dan belum dapat disimpulkan apakah sudah lengkap atau perlu dilengkapi lagi.

Ini merupakan yang kedua kalinya diteliti setelah berkas tersebut P-19 beberapa waktu lalu. Dalam penelitian berkas ini, menurutnya, diprioritaskan pada berkas yang sudah diperbaiki. Tim jaksa masih melakukan pemeriksaan fakta-fakta baru di berkas. Bila nanti sudah dirasa cukup dan tidak perlu ada pendalaman lagi, maka dinilai sudah rampung.

Tetapi bila ada fakta baru

yang harus dialami lagi, jaksa akan menyerahkan lagi untuk dilengkapi. Berkas ini merupakan berkas dengan tersangka KRA (55) yang memenangkan tender pengadaan sapi untuk sejumlah kelompok tani. Kasus ini terkait pengadaan 100 ekor sapi pada tahun 2013. Diperkirakan, kerugian negara yang muncul mencapai Rp 80 juta.

Tersangka terancam me-

langgar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Ratusan sapi betina ini disediakan untuk pengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis organik dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana. (kmb26)

Edisi : Jumat, 9 Juni 2017
Hal : 12



Bali Post



Pemkab Anggarkan Rp 10 Miliar

Mangupura (Bali Post) -

Pemerintah Kabupaten Badung merancang perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jalan Usaha Tani (JUT) di beberapa kecamatan di Badung. Dalam perencanaannya, proyek tersebut dianggarkan pada APBD Badung tahun 2017 sebesar Rp 10 miliar.

Saat ini pemerintah sudah melakukan tender di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Informasi yang didapat, proyek perbaikan JITUT tahun ini difokuskan di Kecamatan Mengwi dan Kuta Utara dengan anggaran sebesar Rp 5 miliar. Sedangkan untuk perbaikan JUT, akan difokuskan di Kecamatan Abiansemal dan Petang dengan nilai proyek yang sama, yaitu Rp 5 miliar. Jadi ada Rp 10 miliar yang dianggarkan dalam JITUT dan JUT tersebut.

Dikonfirmasi Kamis (8/6) kemarin, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung, IGAK Sudaratmaja, membenarkan rencana perbaikan proyek tersebut. Namun, dia mengatakan proyek tersebut ditangani langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). "Kami di Dinas Pertanian dan Pangan hanya membantu dalam urusan mensosialisasikan proyek ini kepada masyarakat, kepada petani," katanya.

Ditambahkan, sebagai bentuk

antisipasi dari kemungkinan adanya dampak saat pelaksanaan perbaikan nanti, pihaknya sudah merancang untuk mengubah pola tanam. Hal itu dilakukan khususnya bagi daerah-daerah yang terkena dampak langsung. "Misalkan nanti berdampak pada kesulitan air. Kami sudah arahkan supaya petani menanam palawija. Karena tanaman jenis ini tidak memerlukan banyak air, sehingga petani masih bisa bercocok tanam," sambungnya.

Terpisah, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung A.A. Gde Dalem menyatakan dua proyek yang sedang dipersiapkan pelaksanaannya ini masih dalam proses lelang di LPSE. Pihaknya menargetkan proyek perbaikan saluran irigasi ini rampung pada November 2017 mendatang. "Yang jelas ada dua proyek yang sekarang masih dalam proses lelang, yakni perbaikan JITUT dan JUT," ujarnya. (kmb23)

Edisi : Jum'at, 9 Juni 2017

Hal : 3



Rekening Belanja Tak Sesuai Program

Bedah Rumah Ditunda

Bangli (Bali Post) -

Program bedah rumah di Bangli belum bisa direalisasikan hingga kini. Padahal program tersebut dirancang dilaksanakan pada Mei. Tertundanya pelaksanaan program ini lantaran terjadinya kekeliruan pada penempatan rekening belanja pemerintah.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli Nengah Sukarta didampingi Sekretaris Made Sudiarsa, Kamis (8/6) kemarin, mengatakan sesuai perencanaan, tahun ini pihaknya akan membedah rumah warga miskin sebanyak 78 unit. Bedah rumah yang dirancang dibiayai dengan dana APBD tersebut tersebar di empat kecamatan, yakni Kecamatan Bangli 12 unit, Kintamani 24 unit, Susut 5 unit dan Tembuku 35 unit. Semua rumah yang mendapat program bedah

rumah sudah selesai diverifikasi oleh tim.

"Rencananya bedah rumah dikerjakan bulan Mei. Tapi terpaksa kami tunda dan akan kami kerjakan pada anggaran perubahan, mendahului sekitar bulan Agustus mendatang," terangnya.

Sukarta menjelaskan, ditundanya pelaksanaan program bedah rumah karena adanya persoalan teknis. Sesuai hasil pemeriksaan BPK, ditemukan adanya kekeliruan pada

penempatan rekening belanja. Anggaran bedah rumah yang seharusnya dipasang pada rekening belanja bantuan sosial barang, sebelumnya dipasang pada rekening belanja hibah. "Hal itu kini sedang kami tindak lanjuti dengan menggeser anggaran yang dipasang di rekening belanja hibah ke rekening belanja bansos," ujarnya.

Pihaknya mengupayakan proses pergeseran nomor rekening tersebut dapat diselesaikan secepatnya agar pelaksanaan

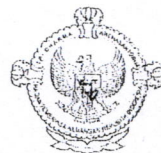
program bedah rumah bisa segera dilaksanakan.

Sukarta mengaku bahwa akibat belum terealisasinya program bedah rumah, pihaknya menerima banyak keluhan dan pertanyaan dari masyarakat. "Banyak masyarakat yang menanyakan kenapa program bedah rumah dari Pemkab Bangli belum berjalan sampai saat ini. Sementara pengerjaan bedah rumah dari Provinsi Bali sudah hampir selesai," ungkapnya.

Atas kondisi tersebut pihaknya pun berharap kepada seluruh masyarakat terutama calon penerima bedah rumah untuk bersabar. Dia kembali

menyatakan terus mengupayakan program tersebut bisa segera berjalan. "Mudah-mudahan Agustus ini sudah bisa jalan," harapnya.

Ditambahkan Sukarta, selain 78 unit rumah warga miskin yang akan dapat program bedah rumah dengan dana APBD, tahun ini juga terdapat 51 unit rumah warga miskin lainnya yang juga akan mendapat bantuan bedah rumah dari ADD, 27 unit rumah dengan dana CSR dan sekitar 30 unit rumah yang akan mendapat bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Dinas PUPR Kabupaten Bangli. (kmb40)



SK Belum Ditandatangani Bidan PTT Belum Dapat Gaji

Denpasar (Bali Post) -

Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) di Bali rupanya masih belum bisa bernapas lega. Kendati sudah dinyatakan lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setelah digantung pengumumannya selama kurang lebih enam bulan. Kini, mereka dihadapkan pada persoalan gaji yang tak dibayar sejak bulan Maret lalu.

"Kita mengikuti tes CPNS Juli 2016, baru diumumkan Februari 2017. Lama baru diumumkan sekitar 6 bulanan, terus Maret sudah diputus gaji (PTT)-nya. Jadinya, kita sekarang tetap bekerja tanpa gaji," ungkap salah seorang bidan PTT di Karangasem, Ni Wayan Weni, saat mengadu ke DPRD Bali, Kamis (8/6) kemarin.

Menurut Weni, hanya bidan PTT yang bertugas di tujuh kabupaten/kota yang belum menerima gaji pascalulus tes. Sedangkan bidan PTT di Buleleng dan Jembrana telah menerima gaji lantaran SK-nya sudah ditandatangani bupati setempat. Kalaupun nanti dirinya menerima gaji sebesar Rp 2.350.000 (per bulan), belum tentu juga dirapel sejak Maret.

"Tergantung TMT-nya (Terhitung Masa Tugas - red). Kalau TMT April berarti dari April kita terima. Kalau Mei, berarti Mei mulai kita bertugas sesuai SK-nya itu," imbuh perempuan yang menjadi bidan PTT sejak 2007 lalu.

Selama belum digaji, Weni mengandalkan penghasilan dari pekerjaan di luar tempat kerjanya, Puskesmas Abang I. Yakni, dengan membantu orang melahirkan, memasang KB atau implant. Itu pun tidak setiap hari dan hanya mendapat upah sekitar Rp 150 ribu. Padahal, bidan asal Selat, Karangasem ini setiap harinya harus bolak-balik selama 1 jam dari rumah ke Abang.

"Tetap bertahan, mungkin karena sudah senang di situ, anggaplah pengabdian," kata Weni yang pernah menerima gaji Rp 590 ribu saat menjadi bidan PTT. Nasib sama dialami bidan PTT di Denpasar, Ni Putu Suardani, yang mengaku sampai meminjam uang ke sana ke mari demi bertahan hidup. Dirinya sudah menanyakan masalah gaji ke BKD dan Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Namun sama seperti Weni, Suardani hanya diminta bersabar.

"Memang sih tergantung katanya dari kabupaten bagaimana, cepat tidaknya. Jadi yang namanya kabupaten, mungkin bupati-nya sedang ada halangan. Bupati-nya sedang ada acara, jadi belum ditandatangani SK-nya," ujar bidan yang bertugas di Puskesmas Densel 1 ini.

Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman Parta menilai pemerintah kabupaten/kota kurang cekatan menangani proses administrasi bidan PTT yang lulus tes CPNS menjadi pegawai daerah. Dalam hal ini membutuhkan SK yang ditandatangani bupati/wali kota. Mengingat, SK dari MenPAN-RB termasuk NIK sudah turun.

"Kalau ini tidak diproses, ya sampai kapan pun mereka tidak bisa menerima gaji. Sementara mereka terus bekerja, dari pusat sudah dipotong (gaji PTT, red) karena sudah selesai menjadi PTT, CPNS-nya tidak diurus ya berlama-lamalah dia tidak mendapat gaji," ujarnya. Sebelumnya, ada 424 bidan PTT di Bali yang mengikuti tes CPNS. (kmb32)